



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN DAERAH

**NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 19 Agustus 2024

Nomor : 165/ ¹¹⁷⁵ /FPP-DPRD/2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Perda.

Kepada Yth:
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di

Tempat

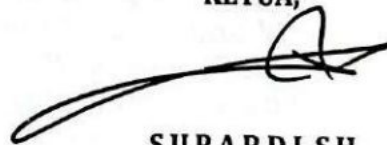
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Agustus 2024, bersama ini kami kirimkan berkas kelengkapannya sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024.
2. Berita Acara Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Pembahasan Badan Anggaran.
5. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terimakasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**



SUPARDI SH



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 17/SB/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 31 Juli 2024;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Agustus 2024;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

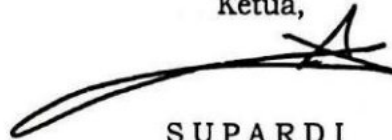
- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dikemudian hari dalam penetapan Keputusan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

Lampiran : Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 17/SB/2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp 7.017.523.894.980,19** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.857.076.350.555,00
2. Belanja Daerah	Rp.	7.017.523.894.980,19
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(160.447.544.425,19)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	160.447.544.425,19
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	180.447.544.425,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.348.283.830.555,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.491.768.520.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17.024.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.698.964.972.421,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	414.280.722.633,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	129.624.977.090,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	105.413.158.411,00
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.461.111.720.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.656.800.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.024.000.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	4.799.148.334.742,19
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.592.082.354.458,16
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.880.966.819.215,03
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	1.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	324.468.713.569,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	130.447.500,00
2. Belanja Modal	Rp.	888.781.649.472,00
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	2.478.117.620,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	260.179.094.536,00
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	253.527.919.183,00
2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	331.752.243.530,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	40.826.174.603,00
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	18.100.000,00
3 Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
4 Belanja Transfer	Rp.	1.316.356.022.857,00
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	1.268.709.922.857,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	47.646.100.000,00

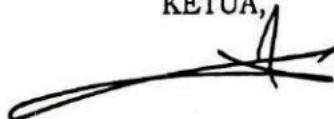
C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan	Rp.	180.447.544.425,19
SILPA	Rp.	180.447.544.425,19
2. Pengeluaran		20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000,00

Padang, 19 Agustus 2024,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



SUPARDI



BERITA ACARA
Nomor : 120 - 157/GSB-2024
Nomor : 120 -10 - 2024

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat. kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA. dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 19 Agustus 2024,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,



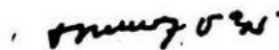
S U P A R D I

Wakil Ketua,



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp 7.017.523.894.980,19** dengan rincian sebagai berikut :

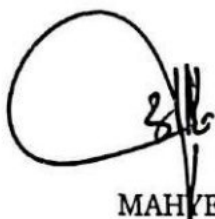
1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.857.076.350.555,00
2. Belanja Daerah	Rp.	7.017.523.894.980,19
<i>Surplus/Defisit</i>	Rp.	(160.447.544.425,19)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	160.447.544.425,19
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	180.447.544.425,19
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000.000,00
A. Pendapatan Daerah. terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	3.348.283.830.555,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.491.768.520.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	17.024.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	2.698.964.972.421,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	414.280.722.633,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	129.624.977.090,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.	105.413.158.411,00
2.1. Pendapatan Transfer		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	3.461.111.720.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.656.800.000,00
3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Pendapatan Hibah	Rp.	17.024.000.000,00
B. Belanja Daerah. terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	4.799.148.334.742,19
1.1 Belanja Pegawai	Rp.	2.592.082.354.458,16
1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.880.966.819.215,03
1.3 Belanja Subsidi	Rp.	1.500.000.000,00
1.4 Belanja Hibah	Rp.	324.468.713.569,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp.	130.447.500,00
2. Belanja Modal	Rp.	888.781.649.472,00
2.1 Belanja Modal Tanah	Rp.	2.478.117.620,00
2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	260.179.094.536,00
2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	253.527.919.183,00
2.4 Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi	Rp.	331.752.243.530,00
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	40.826.174.603,00
2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	18.100.000,00
3 Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	13.237.887.909,00
4 Belanja Transfer	Rp.	1.316.356.022.857,00
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	1.268.709.922.857,00
4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	47.646.100.000,00

C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan	Rp.	180.447.544.425,19
SILPA	Rp.	180.447.544.425,19
2. Pengeluaran		20.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	Rp.	20.000.000.000,00
- Bank Nagari	Rp.	20.000.000.000,00

Padang, 19 Agustus 2024,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK PERTAMA



MAHYELDI

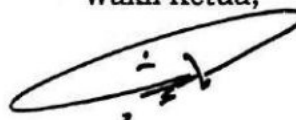
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,



SUPARDI

Wakil Ketua,



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal	: Senin / 19 Agustus 2024
Pukul	: 14.00 Wib
Tempat	: Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Pimpinan Rapat	: Supardi, SH
Pimpinan DPRD	: H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
	: H. Suwirpen Suib, S.Sos
Notulis	: Fadhil Rifki Albisri, S.STP

Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi Partai Gerindra	:	14 Orang
2. Fraksi PKS	:	10 Orang
3. Fraksi Partai Demokrat	:	10 Orang
4. Fraksi PAN	:	10 Orang
5. Fraksi Partai Golkar	:	8 Orang
6. Fraksi PPP- NasDem	:	7 Orang
7. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang

Hadir : Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. Ismunandi Syofyan, SE
2. Muchlis Yusuf Abit, ST, MM
3. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt
4. Mario Syah Johan
5. Jasma Juni Dt. Gadang, SE
6. Jempol
7. Desrio Putra, ST
8. Mesra
9. Evi Yandri Rajo Budiman
10. Khairuddin Simanjuntak
11. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
12. H. Mochklasin, S.Si
13. H. Muhammad Ridwan, S.IP
14. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
15. Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM
16. Drs. H. Asra Faber, MM
17. Rafdinal, SH
18. M. Ihpan
19. Ali Tanjung, SH
20. Suharjono
21. Hj. Aida, SH
22. Jefri Masrul, SE
23. H. M. Nurnas, ST
24. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM, MBA
25. H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa, MM
26. Muhayatul, SE, M.Si
27. H. Maigus Nasir, S.Pd
28. Daswanto, SE

29. H. Dody Delvi, SE
30. H. Muzli M. Nur, S.Pd
31. Hj. Artati, SH, MH
32. H. Bukhari Dt. Tuo, SE
33. Zulkenedi Said, S.Sos, SH, M.Si, MM
34. DR. Hardinalis Kobal, SE, MM
35. Zarfi Deson, SH
36. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
37. Lazuardi Erman
38. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, MM
39. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
40. Sawal Dt. Putih, SH
41. Imral Adenansi, SH, MH
42. Bakri Bakar, SH
43. H. Taufik Syahrial

Eksekutif

: Gubernur Sumatera Barat
 Asisten III Setda Provinsi Sumatera Barat
 Inspektorat
 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
 Dinas Perkimtan
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB
 Dinas Pangan
 Dinas Lingkungan Hidup
 Dinas Pendidikan
 Dinas Satpol PP
 Dinas Perhubungan
 Dinas Kesehatan
 Dinas Koperasi dan UKM
 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Dinas Pemuda dan Olahraga
 Dinas Dinas ESDM
 Dinas Sosial
 Dinas Kominfo dan Statistik
 Dinas Kebudayaan
 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Badan Penelitian dan Pengembangan
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Badan Kepegawaian Daerah
 Badan Kesbangpol
 Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar
 Biro Kesra Setda Provinsi Sumbar
 Biro Umum Setda Provinsi Sumbar
 RSUD M. Natsir Solok
 RSUD Pariaman

BUMD

PT. Jamkrida Sumbar
 PT. Grafika Jaya Sumbar

Turut Hadir

- : A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
 B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

IALANNYA RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD, dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Yth. Rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita kembali dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dengan Agenda Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 2 Juli 2024, pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024, diagendakan 2 (dua) rapat paripurna, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan rapat paripurna dalam rangka penetapan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berhubung belum keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Tata Beracara Badan Kehormatan, maka penetapannya belum dapat dilakukan pada rapat paripurna ini dan akan diagendakan nanti kembali setelah keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pada hari ini kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda, yaitu rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada rapat paripurna tanggal 27 Juli 2024 yang lalu, DPRD bersama Gubernur Sumatera Barat telah menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Menindaklanjuti Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 yang disepakati tersebut, pada rapat paripurna tanggal 31 Juli 2024 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati, proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, belum kredibel oleh karena target pendapatan yang diusulkan masih bersifat tentatif dan baru sebatas upaya untuk menyeimbangkan alokasi belanja yang dibutuhkan.

Kondisi ini disebabkan, oleh karena target pendapatan yang diusulkan pada APBD Tahun 2024 awal diprediksi tidak tercapai dan SILPA dari APBD Tahun 2023 juga tidak sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan kebutuhan belanja justru bertambah, oleh karena cukup banyak kegiatan yang bersifat mandatory, sisa DAK, sisa BOS dan hutang bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang harus dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Kondisi yang terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, sebelumnya juga terjadi dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2023. Ini menunjukkan, bahwa pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, efektif dan efisien. Permasalahan ini, perlu menjadi perhatian dan catatan dari Pemerintah Daerah, agar penyusunan APBD berkualitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Memperhatikan kondisi yang terdapat dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka pembahasan lebih difokuskan pada upaya-upaya untuk menjadikan Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi lebih kredibel, berimbang antara pendapatan dan belanja, efektif dan tepat guna. Kondisi pembahasan tersebut, tentu berdampak sedikit banyaknya terhadap kualitas Perubahan APBD Tahun 2024.

Meskipun dalam pembahasan terdapat peningkatan target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD, akan tetapi masih cukup untuk menjadikan neraca Perubahan APBD Tahun 2024 menjadi berimbang. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan rasionalisasi, terutama untuk kegiatan yang tidak mendesak, kegiatan yang realisasinya masih rendah serta kegiatan pendukung seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan dan perawatan rutin serta kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pencapaian target kinerja RPJMD.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan kesimpulan dapat menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua, yaitu Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang kita laksanakan pada siang hari ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Rapat Paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Bersama dengan TAPD. Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD yang sekaligus merupakan Sekretaris Badan Anggaran kami persilahkan untuk membacakan laporan hasil pembahasan tersebut.

.....

Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut ?

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Sesuai dengan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilanjutkan dengan penetapan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB (dibacakan oleh Sekretaris DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.

Setuju (sahutan hadirin sidang Paripurna) (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan DPRD dan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 17/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang sudah ditentukan.

.....

Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama

.....

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan dan ditanda tangannya Nota Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka acara rapat paripurna ini dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur, kami persilahkan.

.....

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur terhadap Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

1. Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Yth. Rekan-rekan Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
3. Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Opd, Biro, Rsd, Dan Bumd Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Yth. Rekan-Rekan Pers Media Cetak dan Elektronik serta Hadirin yang terhormat.

Alhamdulillah,

sega

la puji dan syukur senantiasa kita sembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita telah dapat menyelesaikan proses pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Shalawat dan salam bagi junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk keselamatan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana pada tahapan sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan menyepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 120-155/GSB-2024 dan Nomor 120-8-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Nota Kesepakatan Nomor 120-156/Gsb-2024 dan Nomor 120-9-2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Pada tahapan berikutnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Di tengah keterbatasan fiskal yang kita alami saat ini kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini serta untuk kebutuhan lainnya yang bersifat strategis, sehingga kebutuhan tersebut tetap dapat kita penuhi.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan pikiran dan perhatian dalam proses pembahasan dan persetujuan prinsip yang telah diberikan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 27 Juli 2024 yang lalu yang menjadi acuan kita dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini.

Dari berbagai tahapan persidangan yang telah diselenggarakan, mulai dari tahapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sampai tahapan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 hari ini, kita telah berusaha untuk senantiasa menggunakan prinsip-prinsip penganggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu efisien, efektif, disiplin, transparan dan akuntabel serta kewajaran dan kepatutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Gambaran umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan, total Perubahan APBD sebesar 7,037 triliun rupiah mengalami kenaikan 199,503 miliar rupiah dari APBD awal sebesar 6,838 triliun rupiah. Kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit sebesar 160,447 miliar rupiah yang merupakan selisih belanja daerah dan pendapatan daerah. Defisit tersebut sesuai ketentuan ditutupi dengan Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari Silpa tahun sebelumnya sebesar 180,447 miliar rupiah yang merupakan hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2023.

Jumlah Silpa sebagaimana dimaksud, di dalamnya terdapat Silpa Earmark yang berasal dari Dana DAK Fisik, DAK Non Fisik, sisa Dana Bos, sisa Dana Bantuan Keuangan Kab/Kota, dan sisa BLUD. Disamping hal tersebut juga terdapat kegiatan tahun 2023 yang penyelesaiannya lewat tahun anggaran dan dianggarkan kembali pada tahun 2024, utang belanja/ pekerjaan yang harus dibayarkan pada tahun 2024, pekerjaan yang sudah ada berita acara serah terima (bast) tetapi belum dibayarkan pada tahun 2023 serta utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/ Kota yang harus dibayarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: total Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 6,857 triliun rupiah, Belanja Daerah sebesar 7,017 triliun rupiah, defisit sebesar 160,447 miliar rupiah, dimana nilai defisit tersebut ditutupi sepenuhnya dengan pembiayaan netto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 6,857 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 4,11% dari APBD awal sebesar 6,586 triliun rupiah. sumber pendapatan tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar 3,348 triliun rupiah naik sebesar 7,38% atau sebesar 230,041 miliar rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah.

- Pendapatan Transfer yang dalam APBD 2024 awal ditargetkan sebesar 3,451 triliun rupiah, pada Perubahan APBD 2024 ini naik sebesar 1,17% atau sebesar 40,458 miliar rupiah sehingga menjadi 3,491 triliun rupiah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hal. 10 dari 15 ditargetkan sebesar 17,024 miliar rupiah pada APBD awal tidak mengalami kenaikan sehingga tetap sebesar 17,024 miliar rupiah pada Rancangan Perubahan APBD.

b. Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati, direncanakan sebesar 7,017 triliun rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 119,503 miliar rupiah atau naik sebesar 2,93% dari Belanja Daerah pada APBD awal sebesar 6,818 triliun rupiah. Total belanja tersebut dapat dirinci menurut kelompok belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, sebesar 4,800 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 2,42% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD awal sebesar 4,686 triliun rupiah.
2. Belanja Modal pada Perubahan APBD direncanakan sebesar 881,594 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 12,62% atau sebesar 98,801 miliar rupiah dari anggaran pada APBD awal sebesar 782,793 miliar rupiah.
3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 18,820 miliar rupiah, turun sekitar 59,91% atau sebesar 28,112 miliar rupiah dari yang dianggarkan pada APBD awal sebesar 46,942 miliar rupiah.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar 1,316 triliun rupiah, naik 1,17% atau sebesar 15,215 miliar rupiah dari APBD awal sebesar 1,301 triliun rupiah.

c. Pembiayaan Daerah.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang telah disepakati, penerimaan Pembiayaan Daerah dialokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu, atau tahun 2023, sebesar 180,447 miliar rupiah, sesuai dengan audit BPK RI atas LKPD tahun 2023, sehingga terjadi penurunan sebesar 70,996 miliar rupiah atau turun sebesar 28,24% dari APBD awal sebesar 251,444 miliar rupiah.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 tahapan lagi yang harus kita lalui, **Pertama** Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah kita setuju bersama sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi, **kedua** kita harus menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan **ketiga** menyusun DPPA-SKPD sebagai dasar dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Kita sudah berupaya dengan segala daya, dan dengan segala kemampuan yang ada untuk memacu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan, namun tentu masih ada hal-hal yang belum dapat kita penuhi. Keadaan demikian disebabkan karena sumber-sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tanggungjawab dan tugas Pemerintah Daerah yang semakin kompleks, juga karena meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terutama sekali dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Saran, masukan dan kritikan dari Fraksi-Fraksi DPRD yang telah disampaikan, semaksimal mungkin telah kita akomodir dan kita sempurnakan walaupun belum memenuhi seluruh keinginan yang telah disampaikan tersebut.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa rangkaian persidangan yang telah dilaksanakan sampai dilahirkannya Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini tentunya menguras energi dan fikiran kita bersama sebagai wujud tanggungjawab kita dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas terjalannya kerjasama yang baik selama ini. semoga niat ikhlas dan ikhtiar kita ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, serta memperoleh ridha dan berkah hendaknya dari Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa billahi taufik wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamith tharik, fastabikhul khairat, Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pendapat Akhir/sambutannya terhadap hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan, bahwa Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Bersama, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang sudah kita sepakati bersama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat dilakukan evaluasi, sehingga realisasinya dapat pula segera dilaksanakan. Semakin cepat evaluasi terhadap Ranperda Perubahan APBD, tentu akan semakin cepat pula pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terdapat dalam Perubahan APBD tahun 2024 dan semakin tinggi pula realisasi kegiatan dan anggaran pada tahun 2024 ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023, merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 bersama dengan

Pemerintah Daerah. Kami menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Masih banyak aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, baik dari pelaksanaan reses maupun yang disampaikan langsung kepada Lembaga yang belum dapat kami perjuangkan. Hal ini tentu bukan disebabkan oleh kesengajaan, akan tetapi banyak permasalahan yang menyebabkan belum terakomodirnya aspirasi tersebut, seperti kewenangan, keterbatasan fiskal serta belum sejalanannya usulan dengan program prioritas daerah.

Untuk itu, dari hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tersebut. Selanjutnya, kepada Pemerintah Daerah, TAPD dan OPD-OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga menyampaikan permohonan maaf, oleh karena dalam pembahasan, baik ditingkat komisi maupun ditingkat Badan Angggara, tidak selamanya berjalan dengan harmonis dan bahkan sering terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa perbedaan dan pertentangan yang terjadi tersebut, semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas hasil pembahasan, agar terwujud APBD yang kredibel, akuntabel, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada sore hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Anggota DPRD, TAPD dan OPD-OPD yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya pembahasan dan penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Selanjutnya, kami menyampaikan juga permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan pembahasan dan pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan membacakan "Alhamdulillahirabbil'alamiin" Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih Wabillahi taufiq walhidayah Wass. Wr. Wb

Pimpinan Rapat,



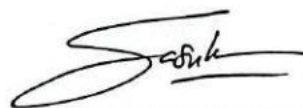
SUPARDI, SH

Sekretaris DPRD,



H. RAFLIS, SH, MM

Pembuat Risalah,



FADHIL RIFKI ALBISRI, S.STP

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN BERSAMA TAPD
TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
SENIN, 19 AGUSTUS 2024**

ASSALAM'MUALAIKUM WR.WB

YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN OPD, DILINGKUP

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Shalawat beriring salam, kita sampaikan juga kepada junjungan umat, Nabi Besar Muhammad SAW, dengan Al-quran dan Hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti.

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 2024 telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

2. Landasan Hukum Pembahasan :

Landasan hukum dari pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan Pembahasan :

Adapun maksud dan tujuan dari pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan dan realisasi belanja daerah yang direncanakan pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024.
- b. Memaksimalkan dukungan APBD terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

B. GAMBARAN UMUM RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang Perubahan APBD, disusun dengan mengacu kepada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah sesuai dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang disepakati oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, diusulkan sebesar Rp. 6.877.451.649.287,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.394.020.579.887,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.453.560.167.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 29.870.902.400,00.
2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.726.959.003.178,19, belanja modal diusulkan sebesar Rp. 863.499.721.336,00 belanja Tidak Terduga diusulkan sebesar Rp. 29.333.160.569,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.418.107.308.629,00.
3. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 180.447.544.425,19 dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 yang digunakan untuk tambahan penyertaan. Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Nagari.

Dari rencana pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, masih dalam bersifat tentatif baik terhadap pendapatan maupun belanja dalam upaya menyeimbangkan negara pada Perubahan APBD Tahun 2024.

C. HASIL PEMBAHASAN

Target pendapatan daerah dan belanja daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 6.877.451.649.287,00 dan rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 belum lagi merupakan target dan alokasi rill, tetapi masih merupakan target tentatif yang perlu di dalam kembali dalam pembahasan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka fokus pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini adalah menghitung kembali target pendapatan rill dan/atau merasionalisasi kembali belanja dalam rangka mem-balancekan dan menutup defisit rill yang terdapat pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

1. Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target PAD yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.394.020.579.887,00 atau naik sebesar Rp. 275.778.528.987,00 dari target yang terdapat pada APBD awal yaitu sebesar Rp. 3.118.242.050.900,00 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 2.771.051.095.473,00 Restribusi Daerah sebesar Rp. 398.745.170.924,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan sebesar Rp. 129.624.977.090,00 dan Lain-Lain PAD Yang sah sebesar Rp. 94.656.800.000,00.

Oleh karena target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, masih merupakan target tentatif yang perlu di dalam kembali, maka Badan Anggaran dan TAPD sepakat untuk mendalami kembali untuk dapat menentukan target yang betul-betul dapat diwujudkan, sehingga tidak berdampak terhadap terjadinya gagal bayar, oleh karena target penerimaan tidak tercapai.

Dari pembahasan dan pendalaman kembali yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD dengan memperhatikan realisasi sampai bulan Agustus 2024 dan target yang mungkin dapat dicapai, maka disepakati target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.348.283.830.555,00 atau berkurang sebesar 45.736.749.332,00 dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut, 1) Pajak Daerah sebesar Rp. 2.698.964.972.421,00 retribusi daerah sebesar Rp. 414.280.722.633,00 Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen BUMD) sebesar Rp. 129.624.977.090,00 dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp. 105.413.158.411,00.

Target yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Perda APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 230.041.779.655,00.

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.453.560.167.000,00 bertambah sebesar Rp. 2.250.000.000,00 dari target yang terdapat pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 3.451.310.167.000,00. Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat tambahan penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 38.208.353.000,00 sehingga target Pendapatan Transfer yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.491.768.520.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 40.458.353.000,00 dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.870.902.400,00 atau bertambah sebesar Rp. 12.846.902.400,00 dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 17.024.000.000,00.

Dari pembahasan yang dilakukan serta memperhatikan potensi yang betul-betul mungkin dapat diwujudkan, maka target yang paling rasional untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sama dengan target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 awal yaitu sebesar Rp. 17.024.000.000,00. Dengan demikian, target penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tidak ada kenaikan sebagaimana yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Dengan ada tambahan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer tersebut, maka proyeksi pendapatan daerah yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.857.076.350.555,00 dengan rincian PAD sebesar Rp. 3.348.283.830.555,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.491.768.520.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17.024.000.000,00.

Terkait dengan target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait untuk bersungguh-sungguh dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan, agar permasalahan seperti Tahun 2023 dimana realisasi pendapatan tidak tercapai, tidak terulang kembali. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Belanja Daerah

Pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 alokasi belanja daerah diusulkan sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19 bertambah sebesar Rp. 219.878.800.763,00 dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 4.726.959.003.178,00 belanja modal sebesar Rp. 863.499.721.336,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 29.333.160.569,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.418.107.308.629,00.

Penambahan alokasi belanja pada Perubahan APBD Tahun 2024 lebih banyak disebabkan oleh karena ada kewajiban pengalokasian belanja tersebut pada Perubahan APBD, baik dari sisa belanja DAK, BOS, hutang kepada pihak ketiga serta hutang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota serta untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, oleh karena ini merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anggota DPRD kepada konstituennya di akhir masa jabatan nanti.

Memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD, disepakati alokasi belanja daerah yang akan ditampung nanti pada Perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.017.523.894.980,19 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4.799.148.334.742,19 Belanja Modal sebesar Rp. 888.781.649.472,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 13.237.887.909,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.316.356.022.857,00

Alokasi belanja daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut, lebih besar Rp. 199.503.502.031,19 dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal. Terkait dengan alokasi belanja daerah tersebut, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terakut, harus lebih sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024.
- b. Segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran terutama kegiatan yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024, dalam upaya meminimalkan kegiatan yang tidak tuntas dan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaannya.
- c. Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya nanti.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD Tahun sebelumnya yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 180.447.544.425,19 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 untuk tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari. Dari hasil pembahasan, komposisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut tidak mengalami perubahan dan untuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA APBD tahun sebelumnya sudah sesuai dengan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

4. Komposisi Perubahan APBD Tahun 2024.

Dari hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, maka diperoleh komposisi Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	sebesar	Rp. 6.857.076.350.555,00
- PAD	sebesar	Rp. 3.348.283.830.555,00
- Pendapatan Transfer	sebesar	Rp. 3.491.768.520.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Sah	sebesar	Rp. 17.024.000.000,00
b. Belanja Daerah	sebesar	Rp. 7.017.523.894.980,19
- Belanja Operasi	sebesar	Rp. 4.799.148.334.742,19
- Belanja Modal	sebesar	Rp. 888.781.649.472,00
- Belanja Tidak Terduga	sebesar	Rp. 13.237.887.909,00
- Belanja Transfer	sebesar	Rp. 1.316.356.022.857,00
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan Pembiayaan	sebesar	Rp. 180.447.544.425,19
- Pengeluaran Pembiayaan	sebesar	Rp. 20.000.000.000,00

D. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi akan menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, merupakan satu kesatuan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Dari pendapat akhir yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, dapat disimpulkan bahwa semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya, Fraksi-Fraksi juga memberikan beberapa catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, sebagai berikut :

1. Mendorong Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk memaksimalkan penerimaan dari pendapatan daerah terutama dari PAD, agar terwujud APBD yang akuntabel, sehat, kredibel, efektif, efisien dan berimbang dan mengantisipasi terjadinya gagal bayar di akhir tahun anggaran.
2. Mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran terutama kegiatan dan anggaran yang diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar realisasinya dapat dimaksimalkan sampai akhir tahun anggaran.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024, untuk dilaksanakan dengan maksimal oleh karena merupakan aspirasi dan usulan dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang telah memberikan amanahnya untuk mewakili di lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat ini.
4. Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan APBD terakhir dalam pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2024. Oleh sebab itu, program dan kegiatan unggulan yang terdapat dalam Perubahan APBD Tahun 2024, harus mendapat prioritas oleh masing-masing OPD terkait.

E. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan, hasil pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini, dapat disepakati pada Rapat Paripurna ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Padang, 19 Agustus 2024

BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT,

KETUA,



SUPARDI, SH.

SEKRETARIS,



H. RAFLIS, SH. MM



FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA TENTANG RANCANGAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat

Senin, 19 Agustus 2024

Juru Bicara :

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota TAPD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat serta hadirin
dan undangan yang kami muliakan

Peserta Rapat Kerja Pembahasan Akhir yang kami muliakan

Alhamdulillahirabbil a'lam, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan
kita semua, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-
fraksi atas Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan TAPD Terhadap RAPBD Perubahan
TAHUN 2024.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin yang Berbahagia,

Setelah menelaah jawaban Sudara Gubernur dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan Ranperda tentang APBD Perubahan 2024, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut;

1. Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan Banggar bersama TAPD dalam upaya mem-*balance*-kan keuangan daerah. Namun, tetap saja, keseimbangan seperti yang diharapkan belum bisa terwujud, karena kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Fraksi Partai Gerindra berharap, kondisi seperti ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada era baru pemerintahan Provinsi Sumatera Barat mendatang.
2. Fraksi Partai Gerindra meminta agar kedepan proyeksi dan capaian Pendapatan Daerah bisa disesuaikan dengan apa yang telah dituangkan dalam RPJMD. Tahun 2024 ini di RPJMD tertulis angka proyeksi diatas Rp 7 Triliun, namun kita belum bisa mencapai target itu.
3. Salah satu tumpuan dan sumber pendapatan daerah kita adalah dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak. Kami berpandangan bahwa para Wajib Pajak adalah pahlawan sesungguhnya dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena, dengan kesadaran mereka membayar setiap pajak, maka pembangunan daerah bisa bergerak. Dengan demikian, maka sudah seharusnya para wajib pajak ini mendapat pelayanan yang baik. Jangan sampai, mereka malah dibuat

stress dengan layanan yang berbelit-belit saat hendak menunaikan kewajiban.

4. Fraksi Gerindra melihat masih banyak hal yang belum sesuai dengan target-target penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Kami sudah berulang kali memberikan catatan-catatan tersebut, namun belum ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
5. Fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov agar berkoordinasi dengan Jasa Raharja dan pihak kepolisian untuk merumuskan bentuk pelayanan yang simpel, mudah dan cepat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN-KB ini. Jika sistem dan aplikasinya sudah ada, kiranya itu bisa dimanfaatkan lebih massif dan intensif, sehingga pada gilirannya akan membawa perubahan signifikan disisi penerimaan daerah.
6. Pemprov harus memastikan tidak terjadi belanja Dinas yang dipaksakan untuk dihabiskan atau akan terjadi SILPA yang besar pada akhir Tahun Anggaran. Besarnya SILPA anggaran tentu akan menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena APBD masih menjadi pendorong utama perekonomian daerah.
7. Fraksi Partai Gerindra berharap, saat kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik seperti ini, kita semua, terutama pimpinan OPD, bisa meningkatkan kinerja dengan baik. Lebih sungguh-sungguh dan bekerja dengan hati.
8. Perlu ada evaluasi dan tindakan menyeluruh terhadap OPD yang realisasi anggarannya jauh dibawah target yang diharapkan, karena berpotensi bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Sebaliknya, jika ada yang tinggi realisasi pendapatannya dan belanjanya, perlu diberikan reward khusus.

9. Terakhir, Fraksi Partai Gerindra berharap Saudara Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran. Hal ini penting, karena di lapangan masih ditemui adanya proses pelelangan yang lambat yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kami minta ini jadi perhatian dan jadi bahan evaluasi.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Gerindra terhadap RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Setelah melihat semua struktur APBD Perubahan tahun 2023 ini, maka dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, Fraksi Gerindra menyatakan **BERSETUJU** jika Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun 2024 ini dijadikan PERATURAN DAERAH, dengan catatan untuk segera dilaksanakan

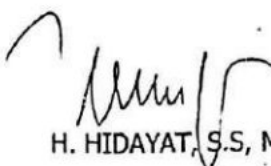
Wabillahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua


H. HIDAYAT, S.S., M.H



DPRD PROV. SUMBAR

Sekretaris

NURKHALS DT.BIJO DIRAJA, S.Pt

Penasihat:

Supardi

Anggota:

1. Desrio Putra
2. Evi Yandri Rajo Budiman
3. Ismunandi Syofyan, SE
4. Jasma Juni Dt.Gadang, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafuruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Azza wa Jalla Tuhan Yang Maha Esa, kita memuji dan memujanya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin ya rabbal 'alamin...*



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



Alhamdulillah Ranperda Perubahan 2024 telah sampai pada tahap penyampaian akhir fraksi. Tahun 2024 Sumatera Barat dilanda dengan berbagai macam bencana, sehingga Pemerintah dan DPRD harus menyusun ulang kembali anggaran yang telah disepakati 2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berterimakasih kepada banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan 2024. Kami berharap pendapat akhir fraksi ini menjadi masukan dan penyempurnaan terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2024.

***Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan
Hadirin yang berbahagia***

Masa perodesasi anggota DPRD Sumatera Barat 2019-2024 telah mencapai ujung masa jabatan, perubahan APBD 2024 ini merupakan pembahasan anggaran terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumbar masa jabatan 2019-2024. Alhamdulillah perubahan APBD 2024 telah selesai dilaksanakan, semoga anggaran perubahan 2024 ini dapat menunjang pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik.

APBD Perubahan 2024 ini sebagai bentuk optimalisasi dukungan APBD terhadap pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Maka dari itu perubahan APBD ini harus benar-benar dibahas komprehensif harus terdapat balance antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga tidak terjadi kemudian gagal bayar akibat dari belanja yang tidak diperhitungkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang Perubahan APBD, disusun dengan mengacu kepada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD. Setelah membaca laporan hasil pembahasan APBD Perubahan 2024 dapat dilihat bahwa Target pendapatan daerah dan belanja daerah yang diusulkan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



2024 sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,19.

Besarnya belanja yang ditargetkan dari pada pendapatan maka tidak terdapatnya check and balances terhadap pendapatan dan belanja. Jangan sampai dikemudian hari terjadinya gagal bayar, oleh karena target penerimaan tidak tercapai. Maka harus dikoreksi apabila menemukan kejanggalan dalam menetapkan target tersebut yang nantinya akan berdampak kepada anggaran daerah.

Setelah mengikuti pembahasan, membaca dan mendiskusikan laporan akhir pembahasan perubahan APBD tahun 2024, maka fraksi partai keadilan sejahtera Provinsi Sumatera Barat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Target PAD yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.394.020.579.887,- atau naik sebesar Rp. 275.778.528.987, Setelah dilakukan pendalaman kembali oleh banggar bersama TAPD disepakati target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.348.283.830.555,-. atau berkurang sebesar 45.736.749.332,- dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Fraksi PKS sepakat dengan target tersebut setelah melihat realisasi yang sudah dilakukan, akan tetapi tidak kemungkinan bahwa pendapatan tersebut akan naik, sehingga butuh kinerja yang maksimal pemerintah dalam menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah, terutama upaya meningkatkan deviden BUMD dan pajak.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



2. Pendapatan asli daerah yang terbesar ialah pada sektor pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.698.964.972.421 dan retribusi daerah sebesar Rp. 414.280.722.633, maka Fraksi PKS mendorong dalam pengelolaan pajak ini perlu ditingkatkan pengawasannya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi.
3. Beban belanja daerah yang diusulkan pada perubahan APBD 2024 cukup tinggi dari target yang disepakati pada APBD 2024, alokasi belanja daerah yang akan ditampung nanti pada Perubahan APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.017.523.894.980,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4.800.252.901.089,19.- Belanja Modal sebesar Rp. 861.594.721.336,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 18.820.249.698,- dan Belanja Transfer sebesar Rp. 1.316.856.022.857,-. Atau naik sebesar Rp. 199.503.502.031,19. Serta adanya kegiatan yang sebelumnya belum terlaksana dan akan dilaksanakan di Perubahan 2024, Fraksi PKS meminta keseriusan Pemprov dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan jadwal pelaksanaannya, terutama dengan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi langsung dari masyarakat.

***Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan
Hadirin yang berbahagia***

Setelah mempelajari dan membahas secara seksama akhirnya kami Fraksi PKS berkesimpulan bahwa secara umum hasil pembahasan **Ranperda Perubahan APBD tahun 2024** diatas telah diselesaikan, besar harapan kami kiranya hasil keputusan ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran. Untuk itu, dengan berserah diri kepada Allah SWT dan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahiim" Fraksi PKS menyatakan



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2024 tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Aqulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan mingkum
ASSALAMUALAIKUM, WR, WB.

**Padang, 19 Agustus 2024 M
13 Safar 1446 H**

**Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
Juru Bicara

Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
Ketua



H. Muhammad Ridwan, S.IP
Sekretaris

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024



**Disampaikan Dalam Rapat Pembahasan Akhir
Dalam Rangka Penyampian
Pendapat Akhir Fraksi :**

Senin, 19 Agustus 2024

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor
dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr, Rekan-Rekan wartawan, Media Cetak dan Elektronik

Yth. Hadirin Undangan yang berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**, menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada Badan Anggaran dan Tim TAPD yang telah Menyusun ranperda ini, Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Laporan hasil pembahsan Badan anggaran bersama TAPD. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat paripurna nanti.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan substansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan Pendapat Akhir, catatan saran dan penegasan dalam Pendapat Akhir **Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan penjelasan atas Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini merupakan bagian dari proses tahapan penyusunan perubahan APBD 2024. Perubahan APBD 2024 merupakan Langkah-langkah Konstitusional yang sangat penting dalam merancang program-program Pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat tahun 2024.
2. Pada desain Pembangunan Makro ekonomi Sumatera Barat terutama target Pertumbuhan Ekonomi, target inflasi, target penurunan kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka ditengah resiko politik dan pilkada serentak. Dengan harapan Pembangunan di Sumatera Barat bisa semakin baik, bagus dan berkelanjutan.

3. Mengingat pentingnya tata kelola pencatatan Aset Daerah hal ini menyangkut kekayaan daerah yang seharusnya di inventarisasikan dengan baik jangan sampai aset-aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat masih dikuasai pihak ketiga karena kita lalai melakukan inventarisasi aset yang ada.
4. Terkait Ranperda APBD 2024 Fraksi Partai Demokrat perlu mengingatkan kita semua bahwa pembahasan APBD 2024 tentunya bukan hanya sebatas formalitas tetapi sangat penting untuk menguji sejauh mana konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, khususnya terkait pengelolaan ke uangan daerah serta bagaimana konsistensi antara data-data yang disajikan baik dalam laporan realisasi anggaran dengan posisi saldo serta neraca maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas legalitas.
5. Fraksi Partai Demokrat tetap menyuarakan aspirasi Masyarakat di 19 Kabupaten/Kota. Pada saat pembahasan APBD perubahan ini masih ada terdapat realisasi anggaran dan tingkat pelaksanaan kegiatan di beberapa OPD sangat rendah seperti dinas Perkebunan Pangan dan Holtikultura dan Perkintan, Dalam hal ini kami meminta saudara Gubernur untuk mengevaluasi OPD tersebut.

6. Selanjutnya atas beberapa rekomendasi Badan Anggaran, pada prinsipnya kami menyepakati hal tersebut seperti perlunya optimalisasi fungsi perangkat daerah yang menghasilkan PAD melalui peningkatan kualitas SDM dan kelembagaannya agar target-target PAD dapat mendekati potensi yang sesungguhnya serta tidak mengalami kebocoran, segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran terutama kegiatan yang di usulkan pada perubahan APBD tahun 2024, dalam upaya meminimalkan kegiatan yang tidak tuntas dan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan serta melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya nanti.

7. Setelah nantinya pengesahan Ranperda APBD perubahan tahun 2024 menjadi Perda. Semua OPD sudah harus menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah tertampung di APBD tahun 2024, tidak ada lagi alasan-alasan yang membuat OPD bekerja tidak maksimal. Mudah-mudahan dengan kinerja OPD yang baik akan membuat saudara Gubernur terpilih Kembali, Amin ya rabbal alamin.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*" Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Padang, 19, Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Sekretaris,


ALI TANJUNG **Hj. A I D A, SH**

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

**RAPAT KINERJA
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
SENIN, 19 AGUSTUS 2024
JURU BICARA : H. DASWANTO,SE**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yang kami hormati Saudara Sekda beserta jajaran pemerintah provinsi sumatera barat

Yang kami hormati Forkopinda sumatera barat

Para tamu undangan, rekan-rekan media pers serta segenap hadirin yang berbahagia

Bersyukur tanpa batas kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini pada rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Sumatera Barat Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2024. *Sholawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan sidang, yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi partai PAN ini. Harapan kami tentunya pendapat yang kami sampaikan akan memperkuat keputusan yang nantinya akan kita ambil bersama pada sidang paripurna ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kasih kepada Yth. Saudara Gubernur atas penyampaian Nota Keuangan maupun Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan melalui rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Anggaran, TAPD, Komisi-Komisi, dan seluruh fraksi yang telah memberikan masukan dan pendapatnya sehingga pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2024 bisa diselesaikan dengan baik. Kita berharap semua kerja ini bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat melalui pelaksanaan APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hadirin rapat dewan yang berbahagia

Di awal kesempatan ini, karena mungkin rapat paripurna ini adalah rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Sumatera Barat masa bakti 2019-2024, maka kami segenap fraksi PAN DPRD Sumatera Barat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami perlu untuk kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini. Pertama kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 79 tahun 2024. Salam Merdeka, Nusantara Baru Indonesia Maju !. Semoga pada peringatan kemerdekaan yang sudah 79 tahun ini kita semakin kokoh sebagai bangsa dan semakin matang sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia. Harapan kami tentunya kita semua akan menjadi batu bata bagi bangunan kemakmuran segenap elemen bangsa, terutama rakyat sebagai elemen utama negara bangsa.

Hadirin Sidang Dewan yang Berbahagia...

Kedua, sekaitan dengan Pekan Olah Raga Nasional yang akan dilaksanakan bulan depan, kami berharap prestasi olah raga kita semakin baik di kancah nasional. Kami mengucapkan selamat bertanding dengan persiapan maksimal kepada para atlet ranah minang yang akan berlaga. Dengan dukungan anggaran di APBDP yang sudah kita perjuangkan ini, harapan kita tentunya keikutsertaan kita di PON nanti bisa membuat berbagai perbaikan yang eksponensial dalam prestasi olah raga sumatera barat. Mari jaga semangat dan energi kebaikan kita untuk sama sama mempersembahkan yang terbaik.

Sidang dewan yang berbahagia...

Di samping itu, pada forum yang mulia ini, izinkan kami fraksi PAN menyampaikan rasa terimakasih kami kepada seluruh pihak yang sudah bekerjasama dengan kami selama periode bakti DPRD ini. Kami berterimakasih kepada gubernur dan wakil gubernur beserta jajaran pemerintah provinsi Sumatera Barat, serta anggota DPRD lintas fraksi, yang dengan segala dinamikanya sudah menjadi mitra terbaik bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan daerah ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kami kepada jajaran forkopinda Sumatera Barat, insan Pers, NGO dan masyarakat Sumatera Barat yang dalam masa bakti 2019-2024 ini

telah membantu dan mendukung kami untuk menunaikan segala tugas dan fungsi kami di DPRD Sumatera Barat.

Di samping itu tentunya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam berinteraksi menjalankan amanah selama ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa banyak salah kekurangan kami dalam menunaikan amanat konstitusi ini. Kami mendoakan agar kita semua selalu dibimbing oleh Allah Yang Maha Kuasa, dijadikan semua bakti kita selama ini sebagai amal shaleh di sisiNYA. Kami Fraksi dan keluarga besar PAN Sumatera Barat tentunya berharap dan terus membuka jalan untuk kita bekerja sama dalam hal yang bisa kita sepakati demi keberlanjutan pembangunan Ranah Minang yang sama-sama kita cintai ini.

Rapat Dewan yang berbahagia

Prinsip-prinsip penyusunan RAPBDP tahun anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024, tentu menegaskan kepada kita semua bahwa penyusunan APBDP ini harus memiliki daya kualitas yang tidak saja dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, tapi juga secara moral dan politik kepada masyarakat. Ketaatan waktu, ketaatan hukum, dan keberpihakan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses penyusunan RAPBDP tahun anggaran 2024 ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

RAPBDP 2024 ini adalah RAPBD yang kita rancang untuk beradaptasi dengan kondisi ril di lapangan setelah sebagian besar wilayah Sumatera Barat dihantam berbagai bencana beberapa waktu lalu. Kita patut bersyukur tentunya, walau kita ditimpa berbagai bencana yang membuat kita mesti mengalihkan lagi fokus dan prioritas belanja kita, indikator pertumbuhan ekonomi kita memperlihatkan tanda-tanda yang masih positif. Apalagi kalau kita cermati dari sisi pemerataannya. Harapan kami fraksi PAN adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini terus diupayakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah dan para petani sebagai komponen terbesar dari masyarakat sumatera barat.

Rapat Dewan Yang terhormat,

Setelah mengikuti dan mencermati proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2024 ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita mengalami defisit anggaran cukup besar dikarenakan berbagai hal. Maka dalam hal ini kita sama-sama sudah melakukan rasionalisasi, efisiensi dan fixsasi program prioritas. Maka pada tahap akhir pengesahan ini kami dari Fraksi PAN hanya menyampaikan beberapa catatan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan persetujuan dalam pendapat akhir ini.

Pertama, kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya yang ada agar target pendapatan yang disepakati dalam pembahasan APBDP ini bisa terlampaui realisasinya. Sehingga rencana belanja bisa dieksekusi sesuai target dan kita bisa menutup keuangan dalam kondisi keuangan yang stabil. Apalagi dalam hal PAD, jika tidak tercapai lagi, maka hal ini akan sangat mengganggu belanja program bagi masyarakat kita.

Kedua, dalam hal belanja, dikarenakan saat ini kita sudah memasuki proses Pilkada yang juga menyedot anggaran daerah yang tidak sedikit, harapan kami tentunya pemerintah provinsi bisa lebih selektif dan akurat dalam menentukan kegiatan dari program-program yang sudah disepakati sembari memaksimalkan dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Terutama program unggulan gubernur, tentu membunuh kreativitas aparatur yang lebih tinggi agar dalam situasi yang sulit, waktu yang singkat, program tetap berjalan dan memberi dampak optimal bagi masyarakat. Kami tidak menginginkan nantinya alasan defisit anggaran membuat target-target prioritas program tidak bisa diwujudkan dengan baik.

Ketiga, dalam hal pembiayaan, harapan kami adalah bagaimana ke depan pemerintah provinsi bisa mendapatkan sumber-sumber yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar, terutama mendorong BUMD untuk bisa berkontribusi. Kami mengingatkan agar pembiayaan ini dapat dianalisa lebih cermat dan dieksekusi lebih kuat, agar capaiannya melebihi dari apa yang kita rencanakan dan bukan sebaliknya, malah minus realisasi yang akan membuat kita semakin kesulitan dalam mengelola anggaran, terutama belanja.

Rapat Dewan Yang Terhormat

Berdasarkan hasil pembahasan sesuai tahapan serta beberapa catatan diatas, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda.

Selanjutnya dari apa yang telah disepakati, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp. 6.857.076.350.555,-
Belanja	Rp. 7.017.523.894.980,-
Pembiayaan	Rp. 160.447.544.425,19

Demikianlah pendapat Akhir Fraksi Partai PAN atas Penetapan Ranperda tentang RAPBDP Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024. Semoga APBDP 2024 nantinya bisa dijalankan sebaik-baiknya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Sumatera Barat bangkit di berbagai bidang. Atas kesalahan, semua sikap dan kata yang tidak berkenan selama pembahasan hingga pendapat akhir ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.

Billahitaufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Padang, 19 Agustus 2024

Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat

		
<u>Muhayatul, SE, MSi.</u>		<u>H. Daswanto, SE</u>
Ketua		Sekretaris

H. INDRA DT RAJO LELO,SH,MM	: PENASEHAT FRAKSI
H. MAIGUS NASIR, S.Pd	: WAKIL KETUA FRAKSI
H.DASWANTO,SE	: SEKRETARIS FRAKSI
H. DODY DELVY,SE	: BENDAHARA FRAKSI
H. MUZLI M. NUR, S.Pd	: ANGGOTA FRAKSI
H. AHMAD RIUS,SH	: ANGGOTA FRAKSI
H. BUKHARI DT TUO, SE	: ANGGOTA FRAKSI
MUHAMMAD IKHEAL.SE	: ANGGOTA FRAKSI
Hj. ARTATI, SH.MH	: ANGGOTA FRAKSI



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG
PERUBAHAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA
SENIN, 19 AGUSTUS 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten. Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Kerja dalam rangka Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur ,Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat ini.



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Badan Anggaran DPRD yang telah dapat merampungkan hasil pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Sebelum kami menyampaikan keputusan Fraksi Partai Golkar , izinkan kami menyampaikan pendapat dan saran terhadap hasil pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, sebagai berikut :

1. Mencermati kepada hasil pembahasan Banggar bersama TAPD terhadap struktur Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.857.076.350.555., terdiri dari :

- PAD sebesar	Rp.3.348.283.830.555,-
- Pendapatan Transfer sebesar	Rp.3.491.768.520.000,-
- Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar	Rp. 17.024.000.000,-
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp.7.017.523.894.980.19,- terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar	Rp.4.800.252.901.089,19,-
- Belanja modal sebesar	Rp. 881.594.721.336,-
- Belanja Tidak Terduga sebesar	Rp. 18.820.249.698,-
- Belanja Transfer sebesar	Rp.1.316.856.022.857,-
 - c. Defisit Rp.160.447.544.425,19,-
 - d. Pembiayaan Daerah
 - Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.180.447.544.425,19,-
 - Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,-
 - Pembiayaan netto sebesar Rp.160.447.544.425,19,-

Dari struktur Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 tersebut diatas pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar berpendapat karena sudah melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot serta sudah optimal, maka pada prinsipnya dapat menyetujui.



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

2. Berdasarkan catatan dari Fraksi Partai Golkar penyampaian pendapat akhir fraksi kali ini termasuk yang tercepat, insya Allah hari ini juga akan dilakukan Rapat Paripurna untuk penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Maka dari itu kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada seluruh Kepala SKPD untuk segera menindak lanjuti pelaksanaan dari Perubahan APBD Tahun 2024, sehingga percepatan yang kita lakukan ini tidak berlalu tanpa realisasi yang memuaskan baik dari segi pendapatan maupun dari segi belanja.
3. Dan kepada SKPD yang mendapat penambahan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2024 ini, baik yang bersumber dari pergeseran antar SKPD maupun yang bersumber dari penambahan murni, kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk segera mempersiapkan langkah-langkah dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatannya. Sangat kecewa kita rasanya dimana penambahan anggaran terjadi tetapi diakhir tahun anggaran menimbulkan SILPA yang besar.
4. Kami dari Fraksi Partai Golkar meminta kepada Saudara Sekda selaku Ketua TAPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Kepala SKPD yang sisa anggarannya masih cukup banyak sampai dengan bulan agustus tahun 2024 ini, sehingga pada tahun 2024 pelaksanaan anggaran yang efektif dan produktif dapat kita wujudkan di Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Akhir kata kami dari Fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim " **dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat**, dengan catatan semua yang telah disepakati dalam pembahasan oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan penyampaian pendapat akhir fraksi hendaknya dilampirkan sebagai bahan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 .

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya.

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Assalamualaikum ww



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Padang, 27 Juli 2024

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua

Sekretaris

(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., .Si., M.M., M.H.,M.AP)

(Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)

Juru Bicara

(.....)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. H.Afrizal, S.H., M.H | (Wakil Ketua) |
| 2. Zarfi Deson, S.H | (Bendahara) |
| 3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M | (Anggota) |
| 4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si | (Anggota) |
| 5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz | (Anggota) |
| H. Lazuardi Erman. S.H | (Anggota) |



FRAKSI PPP – NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir
Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Perubahan Tahun 2024

Disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Antara
DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah
Senin, 19 Agustus 2024

أَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَمَحَالَةٍ

- ✓ Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Yth. Sdr. Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Pembahasan Akhir hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi PPP-

NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

✓ **Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati**

Fraksi PPP-NasDem memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sejak tanggal 01-18 Agustus 2024, semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

✓ **Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati**

Proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian pada periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolak ukur dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2024. Perubahan APBD dalam tahun anggaran berjalan memungkinkan dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surplus anggaran.

Dalam rangka perubahan anggaran inilah kita secara marathon telah membahas berbagai hal yang terkait dengan penambahan anggaran, pengurangan anggaran dan bahkan penghapusan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu setiap anggaran yang disusun harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Bila efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, maka efektivitas adalah melakukan sesuatu yang benar. Efektifitas dapat dikaitkan dengan tujuan umum pemerintah antara lain : kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi), keadilan sosial, stabilisasi, ataupun tujuan sektoral yang lebih spesifik.

Untuk mengetahui capaian efisiensi dan efektivitas, maka perlu adanya indikator-indikator yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran. Selanjutnya indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut harus dapat menjelaskan bahwa penilaian kinerja pelaksanaan anggaran lebih diarahkan pada penggunaan pemenuhan target, dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah, bukan tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Dalam kerangka inilah seharusnya Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun.

Dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, disepakati komposisi struktur anggaran yang akan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.857.076.350.555,-
a. PAD	Rp. 3.348.283.830.555,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 3.491.768.520.000,-
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 17.024.000.000,-
2. Belanja Daerah	Rp. 7.017.523.894.980,-
a. Belanja Operasional	Rp. 4.800.252.901.089,19
b. Belanja Modal	Rp. 881.594.721.336,-
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 18.820.249.698,-
d. Belanja Transfer	Rp. 1.316.856.022.857,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 180.447.544.425,19,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000.000,-

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Setelah mencermati : dan melakukan analisa terhadap laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem memberikan beberapa catatan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Adapun beberapa catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah daerah harus konsisten mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2024 sesuai dengan program-program yang disepakati oleh TAPD dan Banggar pada KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2024.
- b) Fraksi PPP-NasDem berharap Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 diarahkan kepada belanja ~~produktif~~ yang berkualitas. Sedangkan untuk pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD difungsikan untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Sehingga fungsi pembiayaan daerah sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dengan sisi belanja daerah secara makro menjadi berimbang, tidak mengalami defisit maupun surplus.
- c) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan harus taat anggaran dan tepat waktu dalam pelaksanaannya.
- d) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah.
- e) Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar memerintahkan ketua TAPD untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah

dan menyisir/menunda kegiatan-kegiatan OPD yang tidak urgen khususnya pada belanja barang dan jasa.

- f) Fraksi PPP-NasDem menyarankan agar program - program pendidikan dan pelatihan kerja di Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan, dengan harapan dapat memberikan peluang usaha terhadap masyarakat, atau peningkatan keterampilan bagi masyarakat agar dapat diterima pada perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang membutuhkan.
- g) Kepada OPD pengguna anggaran, Fraksi PPP-NasDem meminta agar Pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan kontiniu. Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir tahun anggaran. Karena Pola-pola seperti ini adalah cerminan bahwa proses penyusunan anggaran dan penyerapannya belum efektif, efisien dan proporsional. Harapannya, pola-pola penyerapan seperti di atas seharusnya tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2025.
- h) Fraksi PPP-NasDem meminta keseriusan dari Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dan melaksanakan usulan yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi PPP-NasDem dengan ini dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dijadikan sebagai Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلَسْلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 19 Agustus 2024


Bakri Bakar
Juru Bicara

**Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**


Sawal, SH
Ketua




Irwan Afriadi
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 -

7059325 Padang 25133

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan *-minazzulumati ilannur-* sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam

Pemimpin Serta Hadirin Yang Kami Mulikan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***"Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju"***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azas professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimakasih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konektivitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.
3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegiatan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahasan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.
5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubungan tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi di beberapa titik di Sumatera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024, lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya*, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
7. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.
8. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.
9. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada

Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Padang, 19 Agustus 2024

**PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Albert Hendra Lukman, S.E
Ketua



Firdaus, SH.I
Sekretaris